

## ANALISIS PERTUMBUHAN JARINGAN KANTOR DAN POLA DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhamad Hariri Fadilah<sup>1</sup>, Haris Usman<sup>2</sup>, Rangga Primadillah<sup>3</sup>,  
Alif Azhar<sup>4</sup>, Willy Alija Rahman<sup>5</sup>, Sopian Apandi<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Department of Informatics Engineering, Universitas Pamulang, South Tangerang, Banten 15417, Indonesia  
E-mail: [haririfadilah36@gmail.com](mailto:haririfadilah36@gmail.com), [usmanharis478@gmail.com](mailto:usmanharis478@gmail.com), [ranggaprimadillah@gmail.com](mailto:ranggaprimadillah@gmail.com),  
[alifazhar69@gmail.com](mailto:alifazhar69@gmail.com), [rahmanwilly210@gmail.com](mailto:rahmanwilly210@gmail.com),  
[dosen02601@gmail.com](mailto:dosen02601@gmail.com)

**Abstract**—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu pertumbuhan jaringan kantor lembaga keuangan syariah (LKS) selama periode 2005–2009 dan struktur distribusi plafon pinjaman pada Pegadaian Syariah. Data dianalisis menggunakan Python, dengan visualisasi tren pertumbuhan jaringan kantor BUS, UUS, BPRS, dan Office Channeling serta analisis kategori rentang pinjaman berdasarkan golongan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah jaringan kantor, terutama pada Office Channeling. Sementara itu, struktur plafon pinjaman menunjukkan sistematika yang konsisten, di mana golongan pinjaman lebih tinggi memiliki rentang plafon dan biaya administrasi yang lebih besar. Hasil penelitian ini memberikan gambaran strategis bagi penguatan kelembagaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

**Keywords:** Lembaga Keuangan Syariah; Pertumbuhan Kantor; Pegadaian Syariah; Plafon Pinjaman; Analisis Data

### 1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memegang peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Dalam kurun waktu 2005 hingga 2009, terjadi perkembangan signifikan terhadap jumlah jaringan kantor LKS, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Office Channeling. Di sisi lain, Pegadaian Syariah sebagai lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah juga mengalami transformasi dalam struktur produk dan rentang plafon pinjamannya.

Penelitian ini mencoba menggabungkan dua sudut pandang: perkembangan infrastruktur LKS serta pola distribusi pinjaman pada Pegadaian Syariah. Dengan menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif melalui Python, diharapkan diperoleh wawasan yang komprehensif sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan keuangan syariah nasional..

### 2. TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memegang peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Dalam kurun waktu 2005 hingga 2009, terjadi perkembangan signifikan terhadap jumlah jaringan kantor LKS, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Office Channeling. Di sisi lain, Pegadaian Syariah sebagai lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah juga mengalami transformasi dalam struktur produk dan rentang plafon pinjamannya.

Sementara itu, struktur plafon pinjaman pada lembaga pembiayaan mikro syariah, seperti Pegadaian Syariah, juga menjadi sorotan. Studi dari Wahyuni (2019) menekankan bahwa pengelompokan plafon pinjaman berdasarkan kategori ekonomi nasabah mendorong prinsip keadilan dalam distribusi dana dan efisiensi risiko pembiayaan. Penelitian ini akan memperkuat temuan tersebut dengan data visual dan

eksplorasi komputasional menggunakan pendekatan data science.

### 3. TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sumber Data

1. Dataset jaringan kantor LKS diperoleh dari buku "Membumikan Ekonomi Islam" karya A.M. Saefuddin.
2. Dataset Pegadaian Syariah berdasarkan penggolongan plafon pinjaman per golongan.

#### B. Teknik Analisis

1. Visualisasi Pertumbuhan Jaringan Kantor
  - Bahasa: Python
  - Library: pandas, matplotlib, seaborn
  - Teknik: interpolasi data kosong dan line chart per jenis kantor
2. Analisis Rentang Pinjaman Pegadaian Syariah
  - Bahasa: Python
  - Visualisasi: bar chart untuk selisih plafon maksimal dan minimal per golongan

#### C. Potongan Code

```
1 # Visualisasi jaringan kantor
2 sns.lineplot(data=df, x='Tahun', y='Jaringan Kantor Total')
3
4 # Visualisasi rentang pinjaman
5 plt.bar(df['Golongan'], df['Plafon_Max'] - df['Plafon_Min'])
```

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertumbuhan Jaringan Kantor Lembaga Keuangan Syariah

Visualisasi data dari tahun 2005 hingga 2009 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah jaringan kantor LKS, terutama pada kategori *Office Channeling*. Peningkatan ini mulai tampak mencolok setelah tahun 2006, di mana jumlah titik layanan berbasis kemitraan atau channeling meningkat hampir dua kali lipat

Sebagai Rinci:

- Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya.
- BPRS juga menunjukkan peningkatan jumlah kantor meskipun tidak sebesar BUS dan UUS.
- Lonjakan Office Channeling mengindikasikan strategi ekspansi cepat dengan biaya rendah, yang relevan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Tren ini mendukung data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa sejak 2005, lembaga keuangan syariah mulai menerapkan strategi pelayanan hybrid melalui channel digital dan kerja sama dengan lembaga lokal. Dengan ekspansi ini, akses masyarakat terhadap produk syariah meningkat, dan literasi keuangan Islam pun mulai tumbuh secara signifikan.

#### B. Pola Distribusi Plafon Pinjaman Pegadaian Syariah

Analisis data pinjaman Pegadaian Syariah berdasarkan golongan mengungkapkan adanya rentang plafon pinjaman yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi nasabah. Dari data yang divisualisasikan dalam bentuk grafik batang, diketahui bahwa:

- Golongan 1 (terendah) memiliki plafon minimum dan pembulatan administrasi terendah.
- Golongan tertinggi (misal Golongan 5) memiliki plafon yang jauh lebih besar dan biaya pembulatan yang meningkat secara linier.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelompokan telah didesain untuk mengakomodasi prinsip *ta'adul* (keadilan) dalam Islam, di mana pembiayaan diberikan berdasarkan kesanggupan dan kebutuhan peminjam.

Lebih jauh, struktur ini menguntungkan lembaga pembiayaan karena mengurangi risiko *default* atau keterlambatan pembayaran. Dari perspektif kebijakan, temuan ini menunjukkan pentingnya penetapan plafon berbasis segmentasi sosial-ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu (Zainuddin, 2021; Wahyuni, 2019) memperkuat temuan ini, yaitu bahwa distribusi plafon yang adil dan terukur mampu menjaga keberlangsungan lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah.

*C. Implikasi Terhadap Kebijakan dan Pengembangan LKS.*

Kedua hasil di atas menunjukkan bahwa pembangunan sistem keuangan syariah di Indonesia tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga bersifat strategis. Di satu sisi, ekspansi jaringan kantor mencerminkan aspek infrastruktur dan distribusi layanan. Di sisi lain, sistem plafon pinjaman mencerminkan upaya adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Kombinasi antara pertumbuhan fisik dan fleksibilitas produk keuangan inilah yang menjadi modal besar bagi penguatan ekonomi syariah nasional ke depan. Keberhasilan sistem LKS dan Pegadaian Syariah dalam mengatur distribusi dan ekspansi ini dapat dijadikan model untuk diterapkan pada sektor lain, seperti koperasi syariah atau fintech halal.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Jaringan Kantor . LKS menunjukkan pertumbuhan positif, terutama Office Channeling setelah tahun 2006, yang mendukung pencapaian target inklusi keuangan syariah.
- b. Struktur plafon pinjaman Pegadaian Syariah konsisten, dengan perbedaan rentang yang logis antara golongan, mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam layanan pembiayaan mikro.
- c. Kedua analisis memberikan landasan penting dalam penguatan kelembagaan dan penyusunan strategi pengembangan keuangan syariah nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Saran:

- a. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup periode waktu yang lebih panjang dan mencakup wilayah yang lebih luas, sehingga hasilnya dapat lebih representatif secara nasional.
- b. Perlu dilakukan pengembangan sistem informasi berbasis digital dalam pelaporan dan monitoring jaringan kantor LKS, agar proses ekspansi dapat lebih efisien dan akuntabel.
- c. Pegadaian Syariah disarankan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan adaptif berbasis segmen masyarakat, agar prinsip inklusi dan keadilan dapat terus terjaga.
- d. Kementerian dan lembaga regulator seperti OJK dan KNEKS perlu memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan LKS, tidak hanya dari sisi regulasi tetapi juga melalui penyediaan ekosistem teknologi dan edukasi masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.M. Saefudin, "Membumikan Ekonomi Islam", Jakarta: Gema Insani, 2005.
- [2] Data Pegadaian Syariah, format CSV, 2024.
- [3] Dokumentasi Python Pandas, matplotlib, seaborn.
- [4] Zainuddin, M., "Analisis Perbandingan Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah", Jurnal Ekonomi Islam, vol. 8, No. 2, 2021.
- [5] Rahmawati, S., "Struktur Marhun Bih dan Risiko Pembiayaan", Jurnal Akutansi Syariah, vol. 6, No. 1, 2019.
- [6] OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia 2023", Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- [7] Hosen, M. N. dan Kartika, D. P., "Peran Infrastruktur LKS dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah", Jurnal Keuangan Islam, vol. 5, No. 1, 2020.
- [8] Wahyuni, L. R., "Struktur Pembiayaan Mikro dan Keadilan Distribusi", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 7, No. 2, 2019.